

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanganan permasalahan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Banyumas, diperoleh beberapa poin-poin kesimpulan, diantaranya;

1. Secara birokrasi, proses penyelesaian pemulangan TKI diawali dari inisiasi TKI, yang kemudian direspon oleh agen PPTKIS untuk dilaporkan kepada KBRI. Berikutnya, KBRI melakukan tindak lanjut kepada pihak BNP2TKI, BP3TKI di provinsi, dan Dinas Tenaga Kerja di kabupaten. Pada titik ini terbentuk tim pelaksana koordinasi meliputi perwakilan Dinas Tenaga kerja, PPTKIS, LSM, dan keluarga TKI guna melakukan perencanaan, persiapan dokumen untuk diverifikasi pihak BP3TKI dan pelaksanaan pemulangan hingga penjemputan yang dibantu oleh KBRI dan agen PPTKIS hingga TKI tersebut sampai di daerah asal. LSM Seruni dalam proses ini pun akan melakukan pendampingan purna TKI untuk dilakukan pemberdayaan.
2. Penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian permasalahan permintaan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku pihak pemerintah bukan sebagai aktor yang tunggal dalam proses pemulangan TKI. Dari dinamika ketiga stakeholder tersebut, menunjukkan bahwa pada tingkat formalitas pelaksanaan pemulangan TKI asal Banyumas berjalan dengan tuntas dan

lancar hingga TKI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan daerah asal. Dari tingkat durasi dilakukan secara intensif baik secara formal dan informal, dan tingkat fokus ditunjukkan dari adanya sikap yang sama dalam setiap proses kordinasi dan sosialisasi diantara *stakeholder* yang terlibat. Sementara proses kolaborasi penyelesaian permintaan pemulangan TKI ini pada institusional adanya saling membutuhkan dan berkerjasama mencapai tujuan bersama serta sikap *share understanding* yang mana diantara *stakeholder* memiliki pemahaman yang sama akan tujuan kolaborasi.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses *collaborative governance* Penanganan permasalahan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Banyumas ini, terdapat beberapa implikasi dari hasil penelitian yang dapat peneliti ajukan, antara lain;

1. Dalam prosesnya, terdapat 11 tahapan panjang dalam upaya penyelesaian permintaan pemulangan TKI. Hal tersebut tentu membutuhkan intensitas kolaborasi yang tinggi sehingga secara gradual berdampak pada penurunan kinerja tiap-tiap *stakeholder* terkait dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini dapat menjadi lebih parah apabila kasus yang ditangani lebih dari satu dan serentak terjadi dan beresiko terjadi miskordinasi dan lambatnya proses penyelesaian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bagi *stakeholder* baik di tingkat nasional maupun daerah untuk merubah tahapan penyelesaian menjadi lebih singkat namun efektif melalui peraturan perundang-undangan. Secara konkrit, peneliti juga memberi masukan pada para *stakeholder* untuk

terus menggunakan pola kordinasi baru melalui sistem komunikasi digital sekaligus optimalisasi layanan *customer care* untuk mempercepat respond dan penanganan penyelesaian kasus pemulangan TKI.

2. Pada tingkat daerah, Dinas Tenaga kerja, PPTKIS, LSM, dan keluarga TKI sebagai *stakeholder* sekaligus tim pelaksana kordinasi berupaya maksimal dalam tiap aspek proses kolaborasi. Hal tersebut berimplikasi positif pada tercapainya tujuan yakni pemulangan TKI hingga kembali ke daerah asal. Atas hasil ini, peneliti menyarankan kepada para *stakeholder* untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya tidak hanya kasus pemulangan saja, tapi juga pada kasus lain seperti masalah TKI ilegal yang terdeportasi, kekerasan TKI, atau masalah lain yang sifatnya lebih kompleks. Terkait hal ini, peneliti juga memberi masukan secara konkrit pada para *stakeholder* untuk menciptakan sistem kelembagaan yang baik melalui sistem pemilihan pimpinan yang selektif agar kualitas kinerja dari *stakeholder* tetap terjaga kualitasnya.